



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
 2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264).

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2024.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RAN-PPDT Tahun 2024.
- (2) RAN-PPDT Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

RAN-PPDT Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Instansi Pusat tahun 2024 terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 3

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan menteri atau kepala lembaga Instansi Pusat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 4

- (1) Pendanaan penyelenggaraan RAN-PPDT Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan RAN-PPDT Tahun 2024 dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 mengamanatkan pengembangan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan daerah tertinggal di Indonesia, yang meliputi aspek perencanaan, pendanaan, implementasi, tata kelola, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, telah ditetapkan 62 kabupaten daerah tertinggal periode 2020-2024. Pada aspek perencanaan dilakukan formulasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan 5 (lima) tahunan telah disusun dan diundangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, khususnya agenda kedua dari tujuh agenda pembangunan, yakni “Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”. STRANAS-PPDT Tahun 2020-2024 kemudian diejawantahkan setiap tahunnya dalam RAN-PPDT yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

RAN-PPDT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

RAN-PPDT Tahun 2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan/atau penyesuaian Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2024 terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal. Selain itu, RAN-PPDT Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT) Provinsi Tahun 2024, penyusunan RAD-PPDT Kabupaten Tahun 2024, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, yang mengedepankan keterpaduan, sinergi, dan integrasi pembangunan dalam konteks penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan demikian, RAN-PPDT memiliki peranan penting dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia melalui penerapan kebijakan afirmatif di daerah tertinggal.

B. Isu Strategis dan Prioritas Penanganan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

Kesenjangan antarwilayah masih menjadi salah satu isu sentral dalam agenda pembangunan nasional khususnya di daerah tertinggal. Kesenjangan ini tercermin dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Persentase Penduduk Miskin (PPM) di 62 daerah tertinggal. Pada tahun 2022, rata-rata IPM di daerah tertinggal mencapai 60,11 (enam puluh koma satu satu), angka ini masih dibawah rata-rata nasional yaitu 72,91 (tujuh puluh dua koma sembilan satu). Selanjutnya, PPM di daerah tertinggal tahun 2022 berada pada angka 24,56% (dua puluh empat koma lima enam persen), jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 9,57% (sembilan koma lima tujuh persen).

Situasi di daerah tertinggal mencerminkan permasalahan yang memprihatinkan, terutama terkait keterbatasan akses ke sarana dan prasarana seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan serta infrastruktur yang memadai untuk pergerakan orang dan barang. Keadaan ini disebabkan oleh wilayah kepulauan, pegunungan, dan daerah rawan bencana yang dominan di daerah tertinggal. Keterbatasan ini berdampak pada sulitnya masyarakat mengakses sumber daya alam dan pusat perekonomian lokal, yang kemudian berdampak pada rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Selain itu, keterbatasan ini juga menyebabkan kurangnya pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Dalam 62 daerah tertinggal, permasalahan ini juga berdampak pada rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang membuat pembiayaan pembangunan sangat bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga terkait.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional perlu adanya pemanfaatan produk lokal sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dan penyelenggaraan pembangunan nasional. Mengingat hal tersebut, RAN-PPDT Tahun 2024 perlu memberikan perhatian lebih mengenai upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana/prasarana untuk menunjang pemulihan ekonomi di daerah tertinggal. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki keadaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah tertinggal secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, secara umum dapat dirumuskan isu strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2024 yakni:

1. kurang tersedianya sarana-prasarana;
2. rendahnya aksesibilitas;
3. berbagai keterbatasan yang disebabkan oleh karakteristik tertentu pada daerah tertinggal;
4. rendahnya perekonomian masyarakat;
5. rendahnya sumber daya manusia; dan
6. minimnya kemampuan keuangan daerah.

Merujuk pada kondisi tersebut, fokus pembangunan daerah tertinggal diprioritaskan pada penanganan isu-isu sentral penyebab ketertinggalan, percepatan transformasi ekonomi melalui pemanfaatan produk dalam negeri dan produk-produk lokal di daerah tertinggal serta pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari:

- a. konektivitas, melalui pemenuhan dan peningkatan infrastruktur dasar dan layanan transportasi menuju pusat perekonomian dan pusat pelayanan dasar serta pemenuhan kebutuhan jaringan listrik dan internet;
- b. perekonomian lokal, melalui pelatihan dan pembinaan kewirausahaan berbasis pariwisata, pengembangan produk-produk lokal unggulan berbasis produk olahan, penguatan ketahanan pangan serta perluasan jaringan pemasaran dan penguatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberian afirmasi pendidikan lanjutan, pendidikan dan pelatihan, penyediaan insentif, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar, pembinaan pelestarian budaya lokal, pembinaan ketahanan terhadap bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan di daerah tertinggal.

BAB II . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II SASARAN, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Sasaran, arah kebijakan, dan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal tahun 2024 disusun secara berurutan dimulai dari Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi hingga Wilayah Sumatera. Sasaran PPM dan IPM untuk masing-masing wilayah sudah sesuai dengan ketersediaan data terkini.

A. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Tahun 2024

Sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Papua adalah:

- menurunnya PPM menjadi 28,9% - 29,4% (dua puluh delapan koma sembilan persen sampai dua puluh sembilan koma empat persen) di tahun 2024; dan
- meningkatnya IPM menjadi 58,1 - 58,6 (lima puluh delapan koma satu sampai lima puluh delapan koma enam) di tahun 2024.

Adapun rincian Sasaran IPM dan PPM per kabupaten daerah tertinggal di Wilayah Papua sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Sasaran IPM dan PPM Kabupaten
DT di Wilayah Papua**

Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Target Tahun 2024	
		PPM	IPM
Papua Barat	Teluk Wondama	28,47%	63,36
Papua Barat	Teluk Bintuni	27,33%	67,54
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	15,16%	65,47
Papua Barat Daya	Sorong	21,66%	68,83
Papua Barat Daya	Tambrau	29,16%	56,44
Papua Barat Daya	Maybrat	29,14%	62,69

Papua . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Target Tahun 2024	
		PPM	IPM
Papua Barat	Manokwari Selatan	25,93%	63,26
Papua Barat	Pegunungan Arfak	30,85%	59,69
Papua Pegunungan	Jayawijaya	35,39%	61,33
Papua Tengah	Nabire	22,64%	72,07
Papua Tengah	Paniai	33,01%	60,12
Papua Tengah	Puncak Jaya	30,64%	51,87
Papua Selatan	Boven Digoel	16,62%	65,05
Papua Selatan	Mappi	20,60%	61,84
Papua Selatan	Asmat	23,02%	53,91
Papua Pegunungan	Yahukimo	36,79%	52,79
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	26,92%	48,75
Papua Pegunungan	Tolikara	31,01%	53,22
Papua	Keerom	14,07%	70,13
Papua	Waropen	21,16%	68,88
Papua	Supiori	28,41%	65,84
Papua	Mamberamo Raya	24,41%	55,74
Papua Pegunungan	Nduga	34,25%	34,29
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	36,93%	51,54
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	35,63%	50,77
Papua Pegunungan	Yalimo	30,35%	51,62
Papua Tengah	Puncak	33,83%	46,24
Papua Tengah	Dogiyai	28,03%	58,95
Papua Tengah	Intan Jaya	37,99%	51,05
Papua Tengah	Deiyai	39,47%	53,65

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

2. Arah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua Tahun 2024

Pembangunan wilayah Papua menjadi salah satu prioritas dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. Arah kebijakan pembangunan wilayah Papua yang difokuskan pada meningkatkan skala ekonomi dilakukan dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi industri pengolahan berbasis perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam, dilakukan dengan memastikan bahwa proses pengolahan dilakukan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) menjadi kunci dalam upaya ini, karena mereka memiliki pengetahuan dan kearifan lokal yang sangat berharga dalam mengelola sumber daya alam. Pemerintah dapat membangun kemitraan dengan masyarakat adat Papua untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajemen dalam pengolahan sumber daya alam.

Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan industri pengolahan yang berbasis perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan sebagai alternatif dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam upaya ini, pemerintah harus memastikan bahwa industri yang dibangun didasarkan pada prinsip-prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Penguatan konektivitas dan kemudahan aksesibilitas menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan wilayah Papua untuk menurunkan disparitas harga komoditas dan biaya logistik angkutan bahan pokok. Wilayah Papua merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih terdapat kesulitan dalam mengakses dan mengangkut hasil produksi ke daerah lain.

Untuk itu, perlu fokus pada upaya penguatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur jalan, pelabuhan, dan bandara yang memadai dapat memudahkan transportasi barang dan meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Selain itu, pengembangan jaringan transportasi alternatif seperti jalur sungai dan udara perlu diperkuat. Pemanfaatan jalur sungai dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik di daerah pedalaman, sementara pemanfaatan jalur udara dapat mempercepat waktu pengiriman barang dan menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses melalui jalur darat. Selain itu, pendistribusian bahan bakar minyak satu harga juga menjadi salah satu kunci untuk mengurangi biaya logistik.

Peningkatan konektivitas juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor transportasi dan logistik. Pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan bagi para tenaga kerja di sektor transportasi dan logistik juga perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan Orang Asli Papua (OAP) dalam mengelola transportasi dan logistik.

Pengelolaan sumber daya pangan berbasis komoditas lokal turut menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan wilayah Papua untuk mengatasi masalah daerah rawan pangan, rentan kelaparan dan *stunting* serta daerah miskin. Papua merupakan daerah yang kaya akan potensi sumber daya pangan lokal, namun masih terdapat kesulitan dalam pengelolaannya.

Untuk itu, perlu memperkuat program pengelolaan sumber daya pangan berbasis komoditas lokal dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Program tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan produksi komoditas lokal seperti padi, jagung, ubi kayu, dan sagu serta meningkatkan produktivitas peternakan dan perikanan di daerah-daerah yang rawan pangan.

Peningkatan produksi komoditas lokal dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi pertanian dan pemberdayaan petani. Dukungan dan bantuan teknis kepada petani dan peternak untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi melalui upaya pengembangan produk unggulan pertanian lokal dan peternakan. Selain itu, pemerintah juga dapat membuka akses pasar yang lebih luas untuk komoditas lokal sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Perlunya meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat dan bergizi melalui program-program pendidikan gizi dan kesehatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan serta membantu mengatasi masalah *stunting* dan kekurangan gizi di wilayah Papua.

Optimalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Optimalisasi pelaksanaan otonomi khusus Papua menjadi fokus dalam kebijakan pembangunan wilayah Papua untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah. Papua merupakan salah satu wilayah yang telah menerapkan otonomi khusus, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

Untuk itu, perlu meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi khusus Papua. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para pejabat dan staf pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, tata kelola pelayanan dasar, dan pengembangan ekonomi daerah.

Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah juga perlu dilakukan dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan bandara serta dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan daya saing wilayah Papua.

Kemandirian daerah juga perlu didorong dengan memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat Papua dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program tersebut dapat meliputi penyediaan modal usaha, pelatihan pengelolaan usaha, transformasi ekonomi kampung terpadu dan dukungan pemasaran produk UMKM.

Mengatasi kerentanan ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim dan bencana serta kerentanan terhadap kesenjangan sosial merupakan arah kebijakan pembangunan wilayah Papua yang krusial. Papua merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam serta memiliki tingkat kesenjangan sosial yang cukup tinggi.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu memperkuat kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan di Papua. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan terhadap kawasan hutan, laut, dan pegunungan serta menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan juga dapat memperkuat ketahanan fisik dan sosial wilayah Papua dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana alam. Pemerintah dapat meningkatkan kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi bencana alam dengan memperkuat infrastruktur dan sistem peringatan dini termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal di wilayah Papua, perlu meningkatkan partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya serta meningkatkan akses pendidikan dan penguatan sistem kesehatan, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat Papua serta mengurangi kesenjangan sosial di wilayah Papua.

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua berdasarkan kriteria ketertinggalan
 - a. Sarana dan Prasarana
 - 1) penyediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;
 - 2) pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan;
 - 3) pengembangan perpustakaan dan literasi melalui penyediaan pojok baca digital dan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - 4) peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas umum;
 - 5) pemenuhan kebutuhan air bersih melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - 6) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* melalui pemenuhan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, penyediaan alat surveilans gizi dan unit transfusi darah; dan
 - 7) penguatan sistem kesehatan melalui:
 - a) pembangunan rumah sakit pratama dan Puskesmas;
 - b) pemenuhan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi;
 - c) penguatan layanan primer dan rujukan;
 - d) peningkatan laboratorium kesehatan daerah;
 - e) penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi; dan
 - f) penyediaan peralatan pengendalian penyakit.

b. Aksesibilitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

b. Aksesibilitas

- 1) peningkatan aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan wilayah melalui pembangunan jalan desa strategis;
- 2) peningkatan aksesibilitas untuk mendukung arus barang dan orang melalui subsidi angkutan perintis transportasi udara; dan
- 3) peningkatan konektivitas untuk mengurangi keterisoliran melalui pembangunan infrastruktur transportasi udara.

c. Perekonomian Masyarakat

- 1) peningkatan usaha ekonomi di daerah tertinggal melalui:
 - a) pembinaan, pemberdayaan, dan peningkatan kapasitas koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 - b) pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pelaku usaha dan peningkatan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pemagangan binalavotas;
 - c) peningkatan dan pengembangan ekonomi masyarakat Orang Asli Papua (OAP);
 - d) perluasan jangkauan pemasaran usaha melalui *e-commerce/online*; dan
 - e) pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak khusus penugasan dan supervisi progres pembangunan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga;
- 2) penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk masyarakat melalui akses reforma agraria;
- 3) peningkatan kapasitas lembaga ekonomi masyarakat dan masyarakat daerah tertinggal dalam hal pengelolaan perekonomian, perkebunan, dan kawasan pesisir;
- 4) peningkatan kapasitas tenaga kerja usaha nonpertanian berbasis vokasi dan melalui diversifikasi produk olahan sesuai komoditas unggulan;

5) pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- 5) pengembangan produktivitas potensi unggulan dan produk unggulan melalui:
 - a) peningkatan produksi, pengolahan, dan pengembangan potensi unggulan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - b) pengelolaan pascapanen terintegrasi hulu-hilir yang mencakup peningkatan kualitas produk, diversifikasi produk, dan kurasi produk;
 - c) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk mendukung nilai tambah dan daya saing industri;
 - d) pembangunan *green house* untuk mendukung peningkatan tanaman hortikultura;
 - e) pembangunan jalan produksi pertanian;
 - f) pembangunan jaringan irigasi tanah mendukung sektor pertanian;
 - g) penyuluhan pertanian untuk mendukung peningkatan kapasitas petani ubi jalar;
 - h) ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas;
 - i) peningkatan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan, pengembangan potensi budaya dan keanekaragaman hayati, serta pengembangan produk kreatif sesuai kekhasan lokal; dan
 - j) peningkatan promosi, penguatan sistem logistik, dan akses pemasaran produk unggulan melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan kemitraan usaha.
- 6) penyediaan alat pascapanen produk unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T);
- 7) pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan program sembako; dan
- 8) fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan hutan.

d. Sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

d. Sumber Daya Manusia

- 1) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah tertinggal, melalui:
 - a) pelayanan Keluarga Berencana (KB) di wilayah khusus; dan
 - b) peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang kesehatan;
- 2) peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan masyarakat di daerah tertinggal, melalui:
 - a) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - b) peningkatan kapasitas tenaga kerja bidang pendidikan; dan
 - c) afirmasi pendidikan kesetaraan untuk peserta didik putus sekolah;
- 3) pelestarian budaya melalui peningkatan kapasitas masyarakat berbasis pengarusutamaan gender;
- 4) penyediaan beasiswa S-2 dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
- 5) peningkatan komunikasi publik melalui pembentukan kelompok informasi masyarakat dan pengelolaan konten dan diseminasi informasi publik.

e. Kemampuan Keuangan Daerah

- 1) pemberian bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- 2) pemberian layanan dokumen kependudukan berupa fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) untuk pengembangan pelayanan publik;
- 3) bimbingan teknis perencanaan tata ruang wilayah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- 4) peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih potensial; dan
- 5) pembangunan kompleks kantor pemerintahan dalam rangka mendukung Daerah Otonomi Baru (DOB).

f. Karakteristik Daerah

- 1) penganggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- 2) pengelolaan dan rehabilitasi hutan dan kawasan konservasi;

3) rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- 3) rehabilitasi konflik sosial melalui peningkatan kapasitas dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan pembangunan masyarakat peka damai;
- 4) penanganan kebencanaan melalui kebijakan teknis perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- 5) peningkatan pelestarian lingkungan melalui Restorasi Gambut berupa revitalisasi ekonomi masyarakat.

B. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2024

Sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Maluku adalah:

- a. menurunnya PPM menjadi 17,7% - 18,2% (tujuh belas koma tujuh persen sampai delapan belas koma dua persen) di tahun 2024; dan
- b. meningkatnya IPM menjadi 66,1 - 66,6 (enam puluh enam koma satu sampai enam puluh enam koma enam) di tahun 2024.

Adapun rincian Sasaran IPM dan PPM per kabupaten daerah tertinggal di Wilayah Maluku sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran IPM dan PPM Kabupaten DT di Wilayah Maluku

Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Target Tahun 2024	
		PPM	IPM
Maluku	Kepulauan Tanimbar	23,23%	66,40
Maluku	Kepulauan Aru	24,91%	67,18
Maluku	Seram Bagian Barat	22,91%	69,03
Maluku	Seram Bagian Timur	20,86%	67,28
Maluku	Maluku Barat Daya	25,65%	65,09
Maluku	Buru Selatan	14,55%	67,96
Maluku Utara	Kepulauan Sula	8,44%	67,18
Maluku Utara	Pulau Taliabu	6,00%	64,16

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

2. Arah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan wilayah Maluku pada tahun 2024 diarahkan pada optimalisasi komoditas pertanian dan perikanan yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan wilayah Maluku diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi menjadi lebih maju dan bernilai tambah tinggi melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), dan pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan.

Pembangunan wilayah Maluku akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas serta penanganan kebencanaan. Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas pendidikan melalui, pembangunan fasilitas layanan perpustakaan umum, perluasan akses layanan perpustakaan, dan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; (b) peningkatan kualitas kesehatan melalui pelayanan keluarga bencana, penguatan sistem kesehatan, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* bagi masyarakat; (c) pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital; (d) pemenuhan dan perluasan cakupan pelayanan dasar khususnya pada bidang air bersih dan energi; (e) percepatan pembangunan desa melalui pembangunan sarana dan prasarana elektrifikasi, aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi; dan (f) meningkatkan tata kelola melalui penyelarasan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan hasil hutan wilayah Maluku untuk pengembangan produk unggulan daerah; (b) pengembangan ekonomi masyarakat melalui dukungan akses reforma agraria dan penerapan manajemen koperasi modern; (c) peningkatan produksi pengolahan produk unggulan melalui fasilitasi dan pembinaan industri; (d) mengembangkan pelatihan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah.

Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; (b) mempercepat proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah; (c) membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan; dan (d) bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan poros kawasan transmigrasi; dan (b) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan secara merata di wilayah kepulauan. Penanganan kebencanaan dilakukan melalui pendampingan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku Berdasarkan Kriteria Ketertinggalan

a. Sarana dan Prasarana

- 1) pengembangan perpustakaan dan literasi melalui penyediaan pojok baca digital dan penyediaan mobil perpustakaan keliling, pembangunan fasilitas layanan perpustakaan umum yang dilengkapi dengan sarana layanan seperti perabot, teknologi informasi dan komunikasi dan bahan perpustakaan;
- 2) pemenuhan kebutuhan elektrifikasi melalui pengembangan energi baru terbarukan melalui pemanfaatan air garam dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
- 3) pemenuhan kebutuhan air bersih melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 4) penanganan kebencanaan melalui pendampingan inventarisasi dan analisis kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- 5) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* melalui penguatan pemenuhan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, penyediaan alat surveilans gizi dan unit transfusi darah; dan

6) penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- 6) penguatan sistem kesehatan melalui:
 - a) pemenuhan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi;
 - b) penguatan layanan primer dan rujukan;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi; dan
 - d) penyediaan peralatan penyediaan penyakit.
- b. Aksesibilitas
Pembangunan jalan poros dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi.
- c. Karakteristik Daerah
Pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mendukung rehabilitasi hutan.
- d. Perekonomian Masyarakat
 - 1) Peningkatan usaha ekonomi di daerah tertinggal melalui:
 - a) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan akses reforma agraria;
 - b) penerapan manajemen koperasi modern;
 - c) peningkatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 - d) penyelenggaraan penyuluhan kerja kepada masyarakat serta pelatihan vokasi berbasis kompetensi; dan
 - e) pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak khusus penugasan dan supervisi progres pembangunan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga.
 - 2) Pengembangan produk unggulan melalui:
 - a) perencanaan dan pembangunan industri melalui penyediaan peralatan pengolahan pascapanen;
 - b) penyediaan sarana prasarana pengolahan, pengemasan dan *labelling* hasil pertanian dan perikanan;
 - c) perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro melalui pemasaran *online*;
 - d) pembangunan jalan produksi pertanian;
 - e) pemanfaatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- e) pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas pertanian dan peternakan;
 - f) peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk mendukung nilai tambah dan daya saing industri;
 - g) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan;
 - h) penyediaan benih dan bibit ternak;
 - i) revitalisasi sarana usaha budidaya rumput laut;
 - j) peningkatan kapasitas masyarakat melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD); dan
 - k) fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan hutan melalui pengembangan perhutanan sosial agroforestri yang meliputi penyediaan sarana prasarana, budidaya, dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- e. Sumber Daya Manusia
- 1) pelayanan keluarga berencana;
 - 2) pengadaan insentif bagi tenaga pendidik non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 3) penyediaan beasiswa S-2 dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - 4) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* melalui penyediaan peralatan imunisasi dasar lengkap serta komunikasi publik/diseminasi informasi mengenai *stunting*.
- f. Kemampuan Keuangan Daerah
- 1) fasilitasi penyusunan rancangan perundang-undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah dan kawasan perbatasan negara serta rencana tata ruang wilayah daerah;
 - 2) fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA);
 - 3) fasilitasi pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah sistematis lengkap dan peta bidang tanah untuk desa lengkap luar jawa dan Aparatur Sipil Negara (ASN); dan

4) Bantuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- 4) bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama).

C. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2024

Sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara adalah:

- menurunnya PPM menjadi 24,4% - 24,9% (dua puluh empat koma empat persen sampai dua puluh empat koma sembilan persen) di tahun 2024;
- meningkatnya IPM menjadi 65,6 - 66,1 (enam puluh lima koma enam sampai enam puluh enam koma satu) di tahun 2024.

Adapun rincian Sasaran IPM dan PPM per kabupaten daerah tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran IPM dan PPM Kabupaten DT di Wilayah Nusa Tenggara

Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Target Tahun 2024	
		PPM	IPM
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	27.41%	68.03
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	25.45%	67.10
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	28.19%	68.88
Nusa Tenggara Timur	Kupang	18.52%	67.97
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	26.94%	65.77
Nusa Tenggara Timur	Belu	14.09%	66.08
Nusa Tenggara Timur	Alor	20.48%	64.57
Nusa Tenggara Timur	Lembata	23.69%	68.45
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	22.84%	65.76
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	31.09%	64.55
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	24.38%	66.14
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	24.55%	64.01
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	25.93%	60.20
Nusa Tenggara Timur	Malaka	14.96%	63.88

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

2. Arah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2024

Kebijakan peningkatan pelayanan dasar difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan, pendidikan vokasi pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata; (b) pemenuhan pelayanan dasar melalui air bersih, telekomunikasi, sarana prasarana literasi serta infrastruktur dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; (c) pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital dan pengembangan infrastruktur; (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola pemerintahan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) penguatan sistem kesehatan, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* bagi masyarakat.

Kebijakan dalam rangka peningkatan ekonomi diarahkan untuk: (a) pengembangan produk dan wisata unggulan; (b) hilirisasi industri berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk menciptakan nilai tambah; (c) fasilitasi terhadap kepemilikan tanah; (d) peningkatan ketahanan pangan; dan (e) pengurangan tingkat kemiskinan dan perlindungan sosial.

Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan konektivitas menuju pusat pertumbuhan wilayah yang terintegrasi; (b) penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan; dan (c) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui: (a) pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan serta sektor perikanan; (b) industri pengolahan hasil perikanan; (c) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (d) destinasi pariwisata alam dan budaya sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal; (e) pengembangan kawasan strategis dan pulau-pulau kecil dan terluar; (f) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah; dan (g) pengembangan produk unggulan yang berorientasi menuju gerai pemasaran wilayah yakni ke pusat kegiatan wilayah.

Penanggulangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan bencana dan pemantapan pemulihan pascabencana; dan (c) peningkatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara berdasarkan kriteria ketertinggalan

a. Sarana dan Prasarana

- 1) pengembangan perpustakaan dan literasi melalui penyediaan pojok baca digital, penyediaan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), dan peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- 2) pengembangan kawasan transmigrasi;
- 3) pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- 4) pemenuhan kebutuhan air bersih melalui pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 5) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* melalui pemenuhan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, penyediaan alat surveilans gizi dan unit transfusi darah; dan
- 6) penguatan sistem kesehatan melalui:
 - a) pembangunan rumah sakit pratama;
 - b) pemenuhan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi;
 - c) penguatan layanan primer dan rujukan;
 - d) peningkatan laboratorium kesehatan daerah;
 - e) penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi; dan
 - f) peralatan pengendalian penyakit.

b. Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan wilayah melalui rehabilitasi/peningkatan jalan nonstatus.

c. Karakteristik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

c. Karakteristik Daerah

- 1) penanganan daerah rawan bencana melalui:
 - a) pendidikan dan pelatihan *Search and Rescue* (SAR);
 - b) penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana; dan
 - c) peningkatan ketahanan bencana.
- 2) pencegahan konflik sosial melalui peningkatan kapasitas dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan pembangunan masyarakat peka damai; dan
- 3) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta rehabilitasi hutan dan lahan.

d. Perekonomian Masyarakat

- 1) penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk masyarakat melalui akses reforma agraria serta pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah;
- 2) pelatihan dan vokasi untuk peningkatan usaha ekonomi melalui:
 - a) *workshop* pengelolaan desa wisata dan diversifikasi turunan produk unggulan;
 - b) pelatihan berbasis kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas;
 - c) peningkatan kapasitas masyarakat melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) serta pengelolaan kawasan pesisir dan pengembangan perhutanan sosial;
 - d) penyuluhan kelompok pelaku utama di sektor pertanian serta kelautan dan perikanan; dan
 - e) peningkatan kapasitas koperasi.
- 3) pengembangan produk unggulan melalui:
 - a) penyediaan alat pengolahan pascapanen produk unggulan dan pembangunan sentra produksi unggulan lokal;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di daerah tertinggal;

c) pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- c) pengelolaan perikanan dan kelautan;
 - d) pembangunan jalan produksi pertanian;
 - e) pengembangan produk unggulan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - f) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
 - g) pengembangan dan penyediaan alat pascapanen produk unggulan di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan perbatasan;
 - h) peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk mendukung nilai tambah dan daya saing industri;
 - i) penyediaan bibit ternak; dan
 - j) pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas peternakan.
- 4) pengembangan wisata unggulan melalui:
- a) perluasan jangkauan pemasaran usaha mikro melalui *e-commerce/online*; dan
 - b) pembangunan prasarana amenities dan atraksi desa wisata.
- 5) pengurangan tingkat kemiskinan dan perlindungan sosial melalui pendampingan dan pembinaan ekonomi di daerah pascabencana, Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), Program Keluarga Harapan (PKH), dan program sembako serta pengadaan catu pangan;
- 6) penyediaan bahan bakar untuk mendukung kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi melalui pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak khusus penugasan serta supervisi progres pembangunan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dan penyaluran konverter kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke bahan bakar gas;
- 7) fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan konservasi; dan
- 8) pelaksanaan stimulan sarana pengembangan *silvopasture* kawasan pesisir dan pengembangan perhutanan sosial melalui agroforestri.

e. Sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

e. Sumber Daya Manusia

- 1) peningkatan kesetaraan dan keadilan melalui pengarusutamaan gender bidang sosial dan budaya dan bidang ekonomi;
- 2) pemulihan dan pemenuhan hak anak melalui perlindungan khusus anak korban kekerasan;
- 3) peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui:
 - a) pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan wajib belajar 12 tahun;
 - b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran guru pendidikan penerima tunjangan profesi, penerima insentif, dan tunjangan khusus; dan
 - c) penyediaan beasiswa S-2 dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 4) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui:
 - a) pelayanan Keluarga Berencana di wilayah khusus; dan
 - b) fasilitasi pendidikan kesehatan dan mental spiritual;
- 5) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* melalui penyediaan peralatan imunisasi dasar lengkap serta komunikasi publik/diseminasi informasi mengenai *stunting*.

f. Kemampuan Keuangan Daerah

- 1) fasilitasi penyusunan rancangan perundang-undangan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah dan kawasan perbatasan negara serta rencana tata ruang wilayah daerah;
- 2) fasilitasi pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah sistematis lengkap dan peta bidang tanah untuk desa lengkap luar jawa dan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui penerapan *pilot project* inovasi daerah yang bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T); dan
- 4) pemberian layanan pencatatan sipil melalui fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) untuk pengembangan pelayanan publik.

D. Percepatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

D. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi Tahun 2024

Sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Sulawesi adalah:

- a. menurunnya PPM menjadi 14,6% - 15,1% (empat belas koma enam persen sampai lima belas koma satu persen) di tahun 2024;
- b. meningkatnya IPM menjadi 69,7 - 70,2 (enam puluh sembilan koma tujuh sampai tujuh puluh koma dua) di tahun 2024.

Adapun rincian Sasaran IPM dan PPM per kabupaten daerah tertinggal di Wilayah Sulawesi sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran IPM dan PPM Kabupaten DT di Wilayah Sulawesi

Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Target Tahun 2024	
		PPM	IPM
Sulawesi Tengah	Donggala	69,03%	17,19
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	68,06%	11,93
Sulawesi Tengah	Sigi	71,70%	11,90

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi Tahun 2024

Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di wilayah Sulawesi tahun 2024 diarahkan pada pengembangan industri berbasis logistik, lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis potensi lokal, pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari dengan mempertimbangkan pendekatan mitigasi dan adaptasi bencana. Selain itu, pembangunan di wilayah Sulawesi tahun 2024 mengutamakan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, dan penguatan konektivitas.

Peningkatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

Peningkatan pelayanan dasar di wilayah ini difokuskan pada:
(a) peningkatan kualitas kesehatan melalui upaya pencegahan *stunting* pembangunan keluarga berkualitas, penguatan sistem kesehatan serta penurunan angka kematian ibu dan bayi;
(b) peningkatan layanan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal dan penyediaan insentif profesi guru agama non-Aparatur Sipil Negara (ASN); (c) peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penyelarasan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN); (d) pemenuhan dan perluasan cakupan pelayanan dasar pada bidang literasi digital, air bersih dan energi; dan (e) percepatan pembangunan daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana elektrifikasi, aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi.

Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui beberapa hal, yaitu: (a) Pengembangan pengelolaan komoditas unggulan pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan untuk pengembangan produk unggulan daerah; (b) pengembangan ekonomi masyarakat melalui dukungan akses reforma agraria dan penerapan manajemen koperasi modern; (c) peningkatan produksi pengolahan produk unggulan melalui fasilitasi dan pembinaan industri; serta (d) mengembangkan pelatihan vokasi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pengembangan pusat-pusat ekonomi berbasis potensi wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah; dan (b) pembangunan ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui bimbingan teknis penanganan pengungsi dan penanganan bencana alam dan perlindungan sosial.

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi berdasarkan kriteria ketertinggalan

a. Sarana dan Prasarana

- 1) pengembangan perpustakaan dan literasi melalui penyediaan pojok baca digital, peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, penyediaan mobil perpustakaan keliling;

2) pemenuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- 2) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi rumah sakit;
 - 3) pemenuhan kebutuhan air bersih melalui optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan peningkatan Sarana Air Bersih (SAB);
 - 4) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting melalui pemenuhan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, penyediaan alat surveilans gizi dan unit transfusi darah; dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan melalui:
 - a) pembangunan rumah sakit pratama;
 - b) pemenuhan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi;
 - c) penguatan layanan primer dan rujukan;
 - d) peningkatan laboratorium kesehatan daerah; dan
 - e) penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi.
- b. Karakteristik Daerah
- 1) penanganan daerah rawan bencana melalui peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi; dan
 - 2) pencegahan konflik sosial dan paham radikal melalui forum keserasian sosial.
- c. Perekonomian Masyarakat
- 1) peningkatan usaha ekonomi di daerah tertinggal melalui:
 - a) pelatihan pengembangan ekonomi kreatif dan desa wisata; dan
 - b) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penerapan digitalisasi manajemen koperasi;
 - 2) pengembangan potensi unggulan dan produk unggulan melalui:
 - a) penyediaan sarana peningkatan produktivitas produk unggulan dengan penyediaan alat pascapanen dan pembangunan rumah produksi mebel serta pengadaan konverter kit untuk nelayan;
 - b) perbaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- b) perbaikan pola pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak khusus penugasan;
 - c) perbaikan pengelolaan sertifikat karantina ekspor, impor, dan domestik;
 - d) pengembangan produk unggulan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - e) peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk mendukung nilai tambah dan daya saing industri;
 - f) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan; dan
 - g) pembangunan jaringan irigasi tanah mendukung sektor pertanian;
- 3) pengurangan tingkat kemiskinan dan pengendalian kerawanan pangan melalui:
- a) pemberian bantuan sembako;
 - b) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH); dan
 - c) peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penanganan akses reforma agraria;
- 4) fasilitasi usaha ekonomi produktif di kawasan hutan; dan
- 5) peningkatan perlindungan sosial melalui pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
- d. Sumber Daya Manusia
- Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan masyarakat di daerah tertinggal, melalui:
- 1) penyediaan insentif profesi guru pendidikan agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 2) penyediaan beasiswa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - 3) penyediaan beasiswa S-2 dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- e. Kemampuan Keuangan Daerah
- 1) pemberian layanan dokumen kependudukan berupa fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) untuk pengembangan pelayanan publik;

2) penerapan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- 2) penerapan inovasi yang bersifat tematik untuk mendukung iklim investasi di daerah;
- 3) penguatan pemerintahan dan pemberdayaan pembangunan desa melalui desa cerdas;
- 4) pemberian layanan penyusunan Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL), Peta Bidang Tanah (PBT), dan Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN); dan
- 5) rehabilitasi dan rekonstruksi kompleks kantor pemerintahan dalam rangka penanganan pascabencana.

f. Aksesibilitas

Pengembangan kawasan transmigrasi melalui pembangunan jembatan standar.

E. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

1. Sasaran Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera Tahun 2024

Sasaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di Wilayah Sumatera adalah:

1. menurunnya PPM menjadi 16,9% - 17,4% (enam belas koma sembilan persen sampai tujuh belas koma empat persen) di tahun 2024; dan
2. meningkatnya IPM menjadi 65,4 - 65,9 (enam puluh lima koma empat sampai enam puluh lima koma sembilan) di tahun 2024.

Adapun rincian Sasaran IPM dan PPM per kabupaten daerah tertinggal di Wilayah Sumatera sebagai berikut:

Tabel 2.4 Sasaran IPM dan PPM Kabupaten DT di Wilayah Sumatera

Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Target Tahun 2024	
		PPM	IPM
Sumatera Utara	Nias	13,84%	65,19
Sumatera Utara	Nias Selatan	15,50%	65,13

Sumatera . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

Nama Provinsi	Nama Kabupaten	Target Tahun 2024	
		PPM	IPM
Sumatera Utara	Nias Utara	17,46%	65,52
Sumatera Utara	Nias Barat	19,65%	64,68
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	12,07%	64,80
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	17,00%	67,86
Lampung	Pesisir Barat	12,08%	67,33

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

2. Arah Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera Tahun 2024

Peningkatan pelayanan dasar kebijakan difokuskan pada: (a) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar melalui pengoptimalan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan perluasan jaringan listrik, sarana prasarana serta infrastruktur dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap resiko bencana; (b) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di desa; dan (c) penguatan sistem kesehatan, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* bagi masyarakat.

Kebijakan dalam rangka peningkatan ekonomi diarahkan untuk: a) pengembangan komoditas unggulan sektor pertanian, sektor perkebunan, dan sektor perikanan; b) mewujudkan hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah melalui pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan akhir; c) pemberian bantuan modal dan pengembangan kapasitas badan-badan usaha ekonomi seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa; d) fasilitasi sertifikat karantina ekspor, impor dan domestik serta pemasaran produk unggulan dan jasa daerah; e) pemberian bantuan-bantuan pengurangan kemiskinan; f) fasilitasi terhadap kepemilikan asset; g) peningkatan ketahanan pangan; dan h) menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui: (a) pengembangan kawasan strategis dan pulau-pulau kecil dan terluar; dan (b) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

Peningkatan kesiapsiagaan wilayah dalam menghadapi bencana alam melalui peningkatan kapasitas masyarakat serta penyusunan kebijakan teknis perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

3. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera berdasarkan kriteria ketertinggalan

a. Sarana dan Prasarana

- 1) peningkatan sarana dan prasarana kelistrikan melalui penyediaan listrik perdesaan;
- 2) pemenuhan kebutuhan air bersih melalui perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- 3) penyediaan sarana dan prasarana permukiman melalui pembangunan Rumah Sejahtera Terpadu (RST);
- 4) peningkatan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat melalui pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pasar;
- 5) pengembangan perpustakaan dan literasi melalui penyediaan pojok baca digital, peningkatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, penyediaan mobil/motor perpustakaan keliling, penyediaan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T);
- 6) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* melalui penguatan *public safety center*, penyediaan alat surveilans gizi dan unit transfusi darah;
- 7) penguatan sistem kesehatan melalui:
 - a) penguatan layanan primer dan rujukan;
 - b) penyediaan sarana dan prasarana instalasi farmasi; dan
 - c) penyediaan peralatan penyediaan penyakit.

b. Karakteristik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

b. Karakteristik Daerah

Penanganan kebencanaan melalui pengelolaan pendidikan dan pelatihan *Search and Rescue* (SAR) serta kebijakan teknis perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

c. Perekonomian Masyarakat

1) peningkatan usaha ekonomi melalui:

- a) penyelenggaraan festival adat dan budaya;
- b) pelatihan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan penerapan manajemen koperasi modern;
- c) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan perhutanan sosial di daerah tertinggal;
- d) *pilot project* sarana pengembangan perhutanan sosial serta budidaya lahan perhutanan sosial melalui agroforesti di daerah tertinggal; dan
- e) bantuan sertifikat karantina ekspor, impor, dan domestik di bidang perikanan dan kelautan;

2) penguatan ketahanan pangan melalui pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah;

3) pengembangan produk unggulan melalui:

- a) bantuan peningkatan nilai tambah komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan perindustrian melalui pemanfaatan teknologi;
- b) pelayanan registrasi dan sertifikasi produk unggulan;
- c) pengembangan sarana prasana bagi pengrajin souvenir;
- d) pelatihan keterampilan usaha bagi pekerja wanita di usaha mikro kecil dan menengah; dan
- e) pelatihan pengemasan dan pemasaran produk;

4) pengurangan tingkat kemiskinan melalui:

- a) akses reforma agraria;
- b) asistensi rehabilitasi sosial;

c) penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- c) penyediaan bahan bakar untuk mendukung kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi melalui pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan bahan bakar minyak khusus penugasan serta supervisi progres pembangunan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga dan penyaluran konverter kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke bahan bakar gas; dan
 - d) pemerataan distribusi program keluarga harapan dan program sembako.
- d. Sumber Daya Manusia
- 1) peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemberian tunjangan khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) kepada guru pendidikan agama dan keagamaan kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - 2) peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pelayanan Keluarga Berencana (KB);
 - 3) fasilitasi dan pembinaan pemerintah daerah dalam rangka pengarusutamaan gender bidang politik dan hukum;
 - 4) penyediaan beasiswa S-2 dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - 5) penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi *stunting* melalui penyediaan peralatan imunisasi dasar lengkap.
- e. Kemampuan Keuangan Daerah
- 1) fasilitasi penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA); dan
 - 2) fasilitasi pendaftaran dan pengurusan sertifikat tanah sistematis lengkap dan peta bidang tanah untuk desa lengkap luar jawa dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -

BAB III
PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT* PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Rincian Program, Kegiatan dan *Output* Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Papua

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Keerom	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	10	Orang	Kementerian Agama
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	100	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	1	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	5	Unit	Kementerian Kesehatan
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	192	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Alsintan Untuk Budidaya dan Pascapanen	1	Kabupaten	Kementerian Perindustrian
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	8	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Mesin Traktor untuk Lahan Pertanian	20	Unit	Kementerian Pertanian
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	783	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua	Keerom	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua	Keerom	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua	Mamberamo Raya	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	2	Orang	Kementerian Agama
Papua	Mamberamo Raya	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	11	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	11	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Mamberamo Raya	Perekonomian Masyarakat	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua	Mamberamo Raya	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	8	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua	Mamberamo Raya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	22	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua	Mamberamo Raya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua	Mamberamo Raya	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua	Supiori	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	24,74	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua	Supiori	Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan Prasarana Kelistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM)	1	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	6	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Papua	Supiori	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Supiori	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Supiori	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	24	Desa	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	34,03	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Pabrik Olahan Hasil Perikanan	1	Paket	Kementerian Perindustrian
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengolahan Hasil Sagu	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rumah Industri Pengolahan Hasil Sagu di 4 Distrik	1	Kabupaten	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	6	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Hewan	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1	Unit	Kementerian Pertanian
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Hewan	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan, dan Pembukaan Daerah Wajib Penyakit Hewan	1	Unit	Kementerian Pertanian
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Pertanian lokal	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1	Unit	Kementerian Pertanian
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.528	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua	Supiori	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua	Waropen	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	19,53	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua	Waropen	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Waropen	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua	Waropen	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Waropen	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Waropen	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Waropen	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Waropen	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua	Waropen	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua	Waropen	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua	Waropen	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	691,99	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua	Waropen	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	Kajian Kebijakan Tentang Percepatan Pembentukan dan Pembinaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	1	Paket	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Papua	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)	Kajian Kebijakan Tentang Percepatan Pembentukan dan Pembinaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)	1	Paket	Badan Riset dan Inovasi Nasional
Papua	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	73.092,96	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	12.085	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua Barat	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	5.930	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua Barat	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	12.501,22	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua Barat	Manokwari Selatan	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	20,46	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 41 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Manokwari Selatan	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) (Peninjauan Kembali/Revisi) Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) (Peninjauan Kembali/Revisi) Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua Barat	Manokwari Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat	Manokwari Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	17	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Papua Barat	Manokwari Selatan	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Barat	Manokwari Selatan	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	1.96	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 42 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	3	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan Prasarana Kelistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	1	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	9	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	2.029	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi Penyediaan Alat Pascapanen, Pelatihan, Pemasaran, Pengemasan (Kopi) untuk Kelompok Masyarakat	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	2	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	10	Unit	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	1	Paket	Kementerian Pertanian
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	100	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	111	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Barat	Pegunungan Arfak	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	20,5	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	5	Orang	Kementerian Agama
Papua Barat	Teluk Bintuni	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan Prasarana Kelistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) Terpusat	1	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	5	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronekrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Bintuni	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Bintuni	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Barat	Teluk Bintuni	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	5.089	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Barat	Teluk Bintuni	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Pabrik dan Industri Pengolahan Keladi Jepang	1	Kabupaten	Kementerian Perindustrian
Papua Barat	Teluk Bintuni	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.349	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Barat	Teluk Bintuni	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Teluk Wondama	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Kebijakan Teknis Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Kegiatan Pendampingan Inventarisasi, Analisis Kebutuhan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana serta Verifikasi Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	1	Rekomendasi Kebijakan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Papua Barat	Teluk Wondama	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	5	Orang	Kementerian Agama
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	100	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Sarana Perumahan yang dibangun di Kawasan Transmigrasi	15	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Monitoring Evaluasi Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) non-Standar (Perpipaan)	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Evaluasi Layak Huni	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Aksesibilitas	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Jalan Lingkungan Lok Werianggi	2,5	Kilometer	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembukaan Lahan Tebas Potong	15	Hektar	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peyananaan Perpindahan Transmigrasi	15	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Penataan dan adaptasi	15	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengadaan Catu Pangan	10	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Pendidikan Kesehatan dan Mental Spiritual	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	6	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Wondama	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Budidaya Tanaman Jagung Wilayah Khusus	50	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Budidaya Tanaman Jagung Wilayah Khusus	10	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Budidaya Tanaman Jagung Wilayah Khusus	50	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Tanaman Buah	Budidaya Pisang	5	Hektar	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 48 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Pengadaan Hewan Ternak	Pengadaan Sapi	50	Ekor	Kementerian Pertanian
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi)/Pemberdayaan	5	Paket	Kementerian Sosial
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	441	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Barat	Teluk Wondama	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Barat Daya	Maybrat	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	8,83	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	20	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	7	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	1.676	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Jaringan Irigasi Tanah	Pembangunan Jaringan Irigasi Tanah di Lokasi Fratafen Kampung Isme	1	Paket	Kementerian Pertanian
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Pembangunan 1 Unit <i>Green House</i>	Pembangunan 1 Unit <i>Green house</i> Peningkatan Tanaman Hortikultura.	1	Unit	Kementerian Pertanian
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian Kacang Tanah dan Jagung	1	Kilometer	Kementerian Pertanian
Papua Barat Daya	Maybrat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	11	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Maybrat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Maybrat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	14	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Maybrat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Maybrat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	1	Paket	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.530	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Barat Daya	Maybrat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Barat Daya	Maybrat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Barat Daya	Sorong	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Insentif	2	Orang	Kementerian Agama
Papua Barat Daya	Sorong	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Profesi	1	Orang	Kementerian Agama
Papua Barat Daya	Sorong	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	4	Orang	Kementerian Agama
Papua Barat Daya	Sorong	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	21	Orang	Kementerian Agama
Papua Barat Daya	Sorong	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat Daya	Sorong	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	100	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua Barat Daya	Sorong	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat Daya	Sorong	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Sertifikat Karantina Ekspor, Impor, dan Domestik	12	Bulan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Papua Barat Daya	Sorong	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	18	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat Daya	Sorong	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.123	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Barat Daya	Sorong	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	18,09	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	5	Orang	Kementerian Agama
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan Prasarana Kelistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) Terpusat	1	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	1	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	5	Unit	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	16	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	16	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Perekonomian Masyarakat	Program Pengelolaan Holtikultura	Pengembangan Holtikultura	1	Paket	Kementerian Pertanian
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	84	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Barat Daya	Sorong Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Barat Daya	Sorong selatan	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Barat Daya	Tambrauw	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	6,02	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Barat Daya	Tambrauw	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat Daya	Tambrau	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Barat Daya	Tambrau	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	10	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Tambrau	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Tambrau	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Tambrau	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Tambrau	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	4	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Tambrau	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Barat Daya	Tambrau	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Barat Daya	Tambrau	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Barat Daya	Tambrauw	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Peralatan Pascapanen Pengolahan <i>Virgin Coconut Oil</i> (VCO) dan Turunan Lainnya, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Fasilitasi Pemasaran (Kelapa)	5	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Papua Barat Daya	Tambrauw	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	2	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	4,96	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	11	Orang	Kementerian Agama
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	100	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Sertifikat Karantina Ekspor, Impor, dan Domestik	12	Bulan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	12	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	17	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	3	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Karakteristik Daerah	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Pembenihan untuk Rehabilitasi Tanaman Hutan	1	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	6.795	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Aksesibilitas	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	Pelayanan Transportasi Udara	13	Rute	Kementerian Perhubungan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Aksesibilitas	Subsidi Angkutan Perintis Transportasi Udara	Subsidi Angkutan Transportasi	13	Rute	Kementerian Perhubungan
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	5	Paket	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan dan Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Sayur-Mayur dan Madu)	15	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pengembangan/Peningkatan Produksi Sayur-Mayur	1	Paket	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Penyediaan Bibit Babi bagi Masyarakat	20	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pembangunan Rence Babi dan Penyediaan Bibit Babi bagi Masyarakat	1	Paket	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan	Pengembangan/Peningkatan Produksi Lebah Madu	1	Paket	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan dan Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan	Pengembangan dan Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan	15	Lokasi	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	642	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Jayawijaya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	3,84	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	3	Orang	Kementerian Agama
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	6	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/ Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/ Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Babi	Pengembangan Ternak Babi	10	Kegiatan	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Bawang Putih	Pengembangan Bawang Putih	2	Kegiatan	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Bawang Merah	Pengembangan Bawang Merah	2	Kegiatan	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (Perluasan Tanaman Kopi Arabika)	100	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	944	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Lanny Jaya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	1,67	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pembangunan RS Pratama	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	9	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 62 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	496,55	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Alat Pascapanen (Produksi) Cokelat	3	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Ubi Jalar, Kopi, Buah Merah, Kacang Tanah, Pisang, Sagu, Kelapa, dan Pinang)	24	Unit	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	628	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 63 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Nduga	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	36,58	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Pegunungan	Nduga	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	2	Orang	Kementerian Agama
Papua Pegunungan	Nduga	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Nduga	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	3	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Nduga	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	8	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Nduga	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Nduga	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	8	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Nduga	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Nduga	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	9	Paket	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 64 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Nduga	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Nduga	Perekonomian Masyarakat	Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pemberian Bantuan Modal Usaha Kepada Pengusaha Orang Asli Papua (OAP)	20	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Nduga	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan Jagung, Ubi Jalar, Keladi	1	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Nduga	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	5	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Nduga	Perekonomian Masyarakat	Program Pengembangan Produk Unggulan Jagung dan Pisang	Pembangunan Prasarana Pertanian	3	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Nduga	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	10,98	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	6	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	32	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan Labkesda Provinsi/Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Aksesibilitas	Pelayanan Transportasi Udara	Pelayanan Transportasi Udara	11	Rute	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Gudang Kopi, Lantai Jemur, Mesin Pengupas Basah) (Lantai Jemur Kopi) (Mesin Pengupas Kopi Basah)	18	Unit	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian: Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	6	Unit	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	9	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Pegunungan	Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 67 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	25	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	25	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	916,48	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Pegunungan	Tolikara	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Mesin Pengolahan Pascapanen Kopi Bio, Tempat Pengeringan dan Gudang Penyimpanan Bibit Kopi	1	Kabupaten	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Tolikara	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	3,44	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	13	Orang	Kementerian Agama
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	23	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	33	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	2	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	7.999	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Aksesibilitas	Pelayanan Transportasi Udara	Pelayanan Transportasi Udara	1	Kegiatan	Kementerian Perhubungan
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	823	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Yahukimo	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Yahukimo	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Pegunungan	Yalimo	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	3,46	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Pegunungan	Yalimo	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	6	Orang	Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Pegunungan	Yalimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yalimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	7	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yalimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yalimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yalimo	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	1.030	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Pegunungan	Yalimo	Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Tinggi	Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	1	Paket	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Papua Pegunungan	Yalimo	Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun	Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	1	Paket	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Papua Pegunungan	Yalimo	Aksesibilitas	Pelayanan Transportasi Udara	Pelayanan Transportasi Udara	16	Rute	Kementerian Perhubungan
Papua Pegunungan	Yalimo	Aksesibilitas	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1	Kegiatan	Kementerian Perhubungan
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirusaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	5	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	5	Lokasi	Kementerian Pertanian
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Nanas	Pengembangan Prasarana Perkebunan	2	Lokasi	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	61	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Yalimo	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Pegunungan	Yalimo	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Selatan	Asmat	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	9,97	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Selatan	Asmat	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Asmat	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Asmat	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Asmat	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Asmat	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	4	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Asmat	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	3	Orang	Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Selatan	Asmat	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan Prasarana Kelistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) Terpusat	1	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	17	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Asmat	Sumber Daya manusia	Program Komunikasi Publik	Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat	18	Unit	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Papua Selatan	Asmat	Sumber Daya Manusia	Program Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Diseminasi Publik	1	Unit	Kementerian Komunikasi dan Informatika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Selatan	Asmat	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Selatan	Asmat	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Selatan	Asmat	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan	1	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Selatan	Asmat	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	5.011	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Selatan	Asmat	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	6	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Selatan	Asmat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	195	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Selatan	Asmat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Selatan	Asmat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Selatan	Boven Digoel	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	21,41	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Selatan	Boven Digoel	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	4	Orang	Kementerian Agama
Papua Selatan	Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Selatan	Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Sertifikat Karantina Ekspor, Impor, dan Domestik	12	Bulan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Papua Selatan	Boven Digoel	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	9	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Boven Digoel	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	20	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Boven Digoel	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Boven Digoel	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Boven Digoel	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Lahan	1	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Selatan	Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Rumah Pengolahan dan Pengasapan Hasil Karet Kelompok Tani serta Sarana Pendukungnya	2	Unit	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Selatan	Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan Kawasan Pertanian Padi berupa Penyediaan Sarana Pengolahan Pascapanen untuk Pabrik dan Industri Rumah Tangga	1	Kabupaten	Kementerian Perindustrian
Papua Selatan	Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pengolahan Minyak Kayu Lawang	1	Paket	Kementerian Pertanian
Papua Selatan	Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	938	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Selatan	Boven Digoel	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Selatan	Boven Digoel	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Selatan	Mappi	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	22,15	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Selatan	Mappi	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	10	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Mappi	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	2	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Mappi	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	2	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Papua Selatan	Mappi	Karakteristik Daerah	Restorasi Gambut	Revitalisasi Ekonomi Masyarakat	1	Paket	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	92	Kampung	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan Prasarana Kelistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) Terpusat	1	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	2	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	17	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Selatan	Mappi	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	16	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Papua Selatan	Mappi	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Konservasi Tanah dan Air	1	Paket	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Selatan	Mappi	Perekonomian Masyarakat	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	3.705	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Selatan	Mappi	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirasaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	6	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Selatan	Mappi	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	18.000	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Selatan	Mappi	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	2	Unit	Kementerian Pertanian
Papua Selatan	Mappi	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	294	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Selatan	Mappi	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Selatan	Mappi	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Tengah	Deiyai	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	7,02	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 80 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Deiyai	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Deiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Deiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Deiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Deiyai	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Deiyai	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Deiyai	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	696,04	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Tengah	Deiyai	Aksesibilitas	Program Pengelolaan Penerbangan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	1	Paket	Kementerian Perhubungan
Papua Tengah	Deiyai	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengolahan Hasil Sagu	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Deiyai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	634	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Deiyai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Deiyai	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Tengah	Dogiyai	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	8,71	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Dogiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	5	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Dogiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Dogiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	15	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Dogiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Dogiyai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirusaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	9	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Program Pengembangan Ternak	Pengembangan Ternak Sapi	100	Ekor	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Kedelai	Peningkatan Produksi dan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	1	Paket	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	21	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Dogiyai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Dogiyai	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Tengah	Intan Jaya	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	15,95	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Intan Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Intan Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Intan Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Intan Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Intan Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	4.140	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	9	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan Lokal	8	Lokasi	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Peternakan Masyarakat	Pengembangan Peternakan Masyarakat Lokal	8	Lokasi	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	3	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Intan Jaya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Intan Jaya	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Tengah	Nabire	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	30,55	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Nabire	Kemampuan Keuangan Daerah	Penerapan Inovasi Daerah yang Bersifat Tematik yang Mendukung Iklim Investasi Terutama di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Penerapan <i>Pilot Project</i> Inovasi Daerah yang Bersifat Tematik untuk Mendukung Iklim Investasi di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	4	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	1	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	29	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	13	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Nabire	Aksesibilitas	Pelayanan Transportasi Udara	Pelayanan Transportasi Udara	10	Rute	Kementerian Perhubungan
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	9	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian	45	Kilometer	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan	Pengadaan Bibit Jeruk	380	Hektar	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan	Pengadaan Alat <i>Hand Traktor</i>	50	Unit	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	68	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Nabire	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Nabire	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Tengah	Paniai	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	6.55	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 87 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Paniai	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Paniai	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Paniai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	18	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Paniai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Paniai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	18	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Paniai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Paniai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Paniai	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Paniai	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Petani Ubi Jalar	Pelatihan Penanaman dan Pelatihan Pengolahan	1	Kegiatan	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 88 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Paniai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	18	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Paniai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Papua Tengah	Paniai	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Tengah	Puncak	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	3,19	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Puncak	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	4	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 89 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Puncak	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	8	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Orang Asli Papua (OAP)	Pelatihan Merajut Noken	60	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Buah Merah)	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Kopi)	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	5	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Kambing, Ternak Kelinci, Ternak Babi	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	450	Ekor	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Puncak	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Petsai <i>Pak Choi</i> , Kol/Kubis, Brokoli, Tomat, Cabe Kecil/Rawit, Sawi Putih Granat/ <i>Cabbage</i> , Buncis, Wortel, Jeruk Lokal/Kelila, Nanas Duri, Stroberi 2PJ, Bawang Merah	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	5.200	Kilogram	Kementerian Pertanian
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	9,71	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	8	Kit	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Puskesmas di Kecamatan tanpa Puskesmas	10	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	1.394	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Buah Merah)	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Kopi)	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Ubi Jalar, Kopi, Buah Merah, dan Nanas Duri)	4	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Puncak Jaya	Perekonomian Masyarakat	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Wirausaha Industri Pangan, Barang dari Kayu, dan Funitur yang Telah Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi, Bantuan <i>Start Up Capital</i>	5	Industri Kecil Menengah (IKM)	Kementerian Perindustrian
Papua Tengah	Puncak Jaya	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Papua Tengah	Deiyai	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	7	Orang	Kementerian Agama
Papua Tengah	Dogiyai	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	3	Orang	Kementerian Agama
Papua Tengah	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Insentif	4	Orang	Kementerian Agama
Papua Tengah	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	5	Orang	Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Papua Tengah	Nabire	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	2	Orang	Kementerian Agama
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Perekonomian Masyarakat	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	15.000	Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Sumber Daya Manusia	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	45	Orang	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

B. Rincian Program, Kegiatan dan *Output* Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Maluku

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Buru Selatan	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	26,85	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Maluku	Buru Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	5	Orang	Kementerian Agama
Maluku	Buru Selatan	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	1	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Maluku	Buru Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	11	Kit	Kementerian Kesehatan
Maluku	Buru Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	13	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Buru Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Buru Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	1	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Alat Pengolahan Pascapanen Minyak Atsiri	1	Kabupaten	Kementerian Perindustrian
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan Komoditi di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Kelapa dan Cokelat)	2	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (Rehabilitasi Tanaman Cengkeh)	200	Hektar	Kementerian Pertanian
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (Perluasan Tanaman Pala)	100	Hektar	Kementerian Pertanian
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	250	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 96 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.510	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Maluku	Buru Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Maluku	Buru Selatan	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Maluku	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	59.999,00	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku	Kepulauan Aru	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	29,92	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Maluku	Kepulauan Aru	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Insentif	1	Orang	Kementerian Agama
Maluku	Kepulauan Aru	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	4	Orang	Kementerian Agama
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	100	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 97 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Kepulauan Aru	Kemampuan Keuangan Daerah	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota	1	Persub Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Kepulauan Aru	Sarana dan Prasarana	Penyediaan sarana dan Prasarana Kelistrikan	Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Surya (PLTS) Terpusat	1	Paket	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Kepulauan Aru	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	30	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Kepulauan Aru	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	144	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Kepulauan Aru	Aksesibilitas	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1	Paket	Kementerian Perhubungan
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Peralatan Pengolahan Pascapanen Ikan Asin Kadar Rendah dan Udang	1	Kabupaten	Kementerian Perindustrian
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Pelindungan Sosial	Program Sembako	2.245	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Maluku	Kepulauan Aru	Perekonomian Masyarakat	Pelindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Maluku	Kepulauan Aru	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	33,73	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	4	Orang	Kementerian Agama
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	300	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 99 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Kemampuan Keuangan Daerah	Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RPerpres RDTR KPN)	Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RPerpres RDTR KPN)	2	Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	8	Kit	Kementerian Kesehatan
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	14	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Kepulauan Tanimbar	Perekonomian Masyarakat	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	2	Paket	Kementerian Pertanian
Maluku	Maluku Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	20,25	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Maluku	Maluku Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	4	Orang	Kementerian Agama



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 100 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Maluku Barat Daya	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	7	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Maluku Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Maluku Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	21	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Maluku Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	1	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	100	Ekor	Kementerian Pertanian
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	200	Ekor	Kementerian Pertanian
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	200	Ekor	Kementerian Pertanian
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	6.000	Kilogram	Kementerian Pertanian
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	6.000	Kilogram	Kementerian Pertanian
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	2.451	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Maluku	Maluku Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Maluku Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Maluku	Seram Bagian Barat	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	39,66	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Maluku	Seram Bagian Barat	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	4	Orang	Kementerian Agama
Maluku	Seram Bagian Barat	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) (Peninjauan Kembali/Revisi) Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) (Peninjauan Kembali/Revisi) Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku	Seram Bagian Barat	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Seram Bagian Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Seram Bagian Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	9	Kit	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	22	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku	Seram Bagian Barat	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	1	Unit	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi Sarana Prasarana Penunjang Pengolahan Gula Semut (Aren)	3	Paket	Kementerian Perindustrian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi Pengembangan Produk Olahan Ikan Asap yang Higienis	1	Paket	Kementerian Perindustrian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi Sarana Pengemasan Produk Minyak Kayu Putih	9	Paket	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi Sarana Pengemasan dan Labelling Produk Minyak Kulit Lawang	3	Paket	Kementerian Perindustrian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi Sarana Penunjang Pengolahan Produk Minyak Sereh (Merah)	3	Paket	Kementerian Perindustrian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Fasilitasi Sarana Prasarana Penunjang Pengolahan Kelapa Menjadi Minyak Murni <i>Virgin Coconut Oil</i> (VCO)	11	Paket	Kementerian Perindustrian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Peralatan Pascapanen (Kakao)	15	Kelompok	Kementerian Perindustrian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengadaan Peralatan Pascapanen (Kopra Putih)	10	Kelompok	Kementerian Perindustrian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	1	Paket	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1	Kegiatan	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Benih	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	30	Ekor	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	5.772	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Maluku	Seram Bagian Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Seram Bagian Timur	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	19,86	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Maluku	Seram Bagian Timur	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Kebijakan Teknis Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Kegiatan Pendampingan Inventarisasi, Analisis Kebutuhan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana serta Verifikasi Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	1	Rekomendasi Kebijakan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Maluku	Seram Bagian Timur	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Insentif	4	Orang	Kementerian Agama
Maluku	Seram Bagian Timur	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	4	Orang	Kementerian Agama
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku	Seram Bagian Timur	Kemampuan Keuangan Daerah	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	1	Persub Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku	Seram Bagian Timur	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	20	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Timur	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	1	Unit	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	3	Unit	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	22	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku	Seram Bagian Timur	Sumber Daya Manusia	Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	1	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Usaha Kecil Menengah yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Penguatan Kapasitas yang Terstandar	Pelatihan <i>Vocational</i>	30	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku	Seram Bagian Timur	Aksesibilitas	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	Prasarana Bidang Konektivitas Udara	1	Paket	Kementerian Perhubungan
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan dalam Pengelolaan BUMDes dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) untuk Mengkonsolidasikan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Terutama Kelompok Miskin, Petani, dan Nelayan, serta Pelaku Ekonomi Lainnya	Pembangunan Tempat Produksi Makanan Berbahan Baku Sagu (Mie Sagu, Mutiara, dan Roti Sagu)	1	Unit	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (Peremajaan Tanaman Kelapa)	150	Hektar	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (Perluasan Tanaman Cengkeh)	400	Hektar	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (Perluasan Tanaman Pala)	100	Hektar	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kualitas Ternak Sapi dengan Pendekatan Teknologi IB	Peningkatan Produksi Peternakan	1	Kegiatan	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Produksi pada Sentra-Sentra Pengembangan Padi Sawah untuk Menuju Swasembada Berkelanjutan	Pembangunan Irigasi Tersier	1	Lokasi	Kementerian Pertanian
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	6.587	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	2.758	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 109 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku	Seram Bagian Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Maluku	Seram Bagian Timur	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Maluku	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	24.711	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku Utara	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	11.491	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku Utara	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	22.924,00	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Sarana dan Prasarana	Program Ketahanan Bencana	Pendamping Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	3	Orang	Badan Nasional Penanggulangan Bencana



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Aksesibilitas	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Jalan Poros	4	Kilometer	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	1	Kelompok Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	<i>Pilot Project</i> Sarana Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	<i>Pilot Project</i> Sarana Pengembangan Perhutanan Sosial melalui Agroforestri di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Lahan yang Dibudidayakan dalam mendukung Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	Budidaya Lahan Perhutanan Sosial melalui Agroforestri di Daerah Tertinggal	20	Hektar	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	5	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	13	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Infrastruktur Jalan	Pembangunan Jalan Tani	16	Kilometer	Kementerian Pertanian
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	439	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Maluku Utara	Kepulauan Sula	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	45,83	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Program Ketahanan Bencana	Pendamping Petugas Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	3	Orang	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 112 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	15	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	8	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pulau Limbo	10	Sambungan Rumah (SR)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	247	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Maluku Utara	Pulau Taliabu	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Maluku	Kepulauan Aru	Sarana dan Prasarana	Sarana Elektrifikasi yang Disediakan di Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal	Pengadaan Sarana EBT Berbasis Air Garam di Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Perekonomian Masyarakat	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	15.000	Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Sumber Daya Manusia	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	45	Orang	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

C. Rincian Program, Kegiatan dan *Output* Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Nusa Tenggara

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Kebijakan Teknis Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Kegiatan Pendampingan Inventarisasi, Analisis Kebutuhan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana serta Verifikasi Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	1	Rekomendasi Kebijakan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sumber Daya Manusia	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Wajib Belajar 12 Tahun	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha Berupa Bantuan Operasional Pendidikan Nava Dhammasekha	75	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Insentif	155	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Profesi	28	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	8	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	300	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 115 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Kemampuan Keuangan Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	5.129,18	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	1	Kelompok Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	<i>Pilot Project</i> Sarana Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	<i>Pilot Project</i> Sarana Pengembangan Perhutanan Sosial melalui Agroforestri di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Lahan yang Dibudidayakan dalam mendukung Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	Budidaya Lahan Perhutanan Sosial melalui Agroforestri di Daerah Tertinggal	20	Hektar	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Sertifikat Karantina Ekspor, Impor, dan Domestik	12	Bulan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	2	Kit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	4	Unit	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	8	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	144	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintahan Daerah	Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi	1	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	7.901	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	14.506	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	18.857	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	222.192	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	34,12	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Program Ketahanan Bencana	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana (Melaksanakan Pendampingan dan Pembinaan Ekonomi di Daerah Pascabencana)	1	Layanan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	10	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Alor	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Sarana Air Bersih yang Dibangun di Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal	Pembangunan Sarana Air Bersih di Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	3	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	27	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 119 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sumber Daya Manusia	Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	Komunikasi Publik/Diseminasi Informasi mengenai <i>Stunting</i>	1	Paket	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pelatihan dan Pengembangan Pemasaran Produk Ekonomi Lokal Berbasis Ekonomi Digital	1	Angkatan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Sentra Promosi	0,5	Hektar	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Sarana Pengolahan dan Peralatan Penyulingan Minyak Kayu Putih serta <i>Packaging</i>	0,5	Hektar	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (<i>Food Seller Padi</i>)	1	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (<i>Power Tresher Padi</i>)	40	Unit	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	11	Lokasi	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	20	Hektar	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	9	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan (Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Vanili)	1	Hektar	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (Peremajaan Tanaman Kopi Arabika)	100	Hektar	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	6.017	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Alor	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Alor	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Belu	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	5	Orang	Badan Nasional Penanggulangan Bencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Belu	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	6	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Belu	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Belu	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Belu	Kemampuan Keuangan Daerah	Penerapan Inovasi Daerah yang Bersifat Tematik yang Mendukung Iklim Investasi Terutama di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Penerapan <i>Pilot Project</i> Inovasi Daerah yang Bersifat Tematik untuk Mendukung Iklim Investasi di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
Nusa Tenggara Timur	Belu	Aksesibilitas	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rehab/Peningkatan Jalan non-Status	0,5	Kilometer	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Belu	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Belu	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	1	Unit	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Belu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Belu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	17	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Belu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Belu	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan Labkesda Provinsi/Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Belu	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Hasil Peternakan	Pengembangan Kawasan Peternakan	1	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Belu	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Pengadaan Sarana dan Mesin Produksi Pertanian (Hortikultura Sayur-Sayuran)	1	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Belu	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian	Peningkatan Produksi Komunitas Jagung dan Mete	2	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Belu	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	6.700	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Belu	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	159.677,11	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	38	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Program Ketahanan Bencana	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana (Melaksanakan Pendampingan dan Pembinaan Ekonomi di Daerah Pascabencana)	1	Layanan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Kemampuan Keuangan Daerah	Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RPerpres RDTR KPN)	Dokumen Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RPerpres RDTR KPN)	1	Dokumen Harmonisasi RPerpres RDTR KPN	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Masyarakat di Daerah Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir	40	Orang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Sarana Pengelolaan Kawasan Pesisir yang diberikan kepada masyarakat di Daerah Tertinggal	Pelaksanaan Stimulan Sarana Pengembangan Silvopasture Kawasan Pesisir yang diberikan kepada masyarakat di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Bidang Pariwisata di Kawasan Perbatasan dan di Daerah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar di Daerah Tertinggal	Workshop Pengelolaan Desa Wisata di Kawasan Perbatasan dan di Daerah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar di Daerah Tertinggal	60	Orang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	4	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	1	Kit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pembangunan RS Pratama	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	26	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	144	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	1	Unit	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Permukiman	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Mendukung Rumah Khusus Bagi Warga Eks Timor Timur	92,66	Hektar	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Sarana dan Prasarana	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mendukung Kawasan Warga Pejuang Timor Timur	30	L/Detik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Alat Pengolahan Pascapanen Produk Unggulan Daerah Perbatasan (Jagung, Penepung Jagung, Penggilingan Mie Jagung, dan Sapi)	10	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Produksi	12,5	Kilometer	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Pembangunan Jalan	Pembangunan Ruas Jalan Produksi	21,5	Kilometer	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	15.940	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Kupang	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	36,96	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sumber Daya Manusia	Program Ketahanan Bencana	Layanan Fasilitasi Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam Pascabencana (Melaksanakan Pendampingan Sosial di Daerah Pascabencana)	1	Layanan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	2	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	1	Unit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	12	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	1	Unit	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Sentra Produksi Unggulan Lokal di Daerah Tertinggal (Kelapa)	1	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	5.634	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Lembata	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Lombok Utara	Perekonomian Masyarakat	Prasarana Pengembangan Potensi Sumber Daya Pariwisata yang Dibangun di Daerah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar di Daerah Tertinggal	Pembangunan Prasarana Amenitas dan Atraksi Desa Wisata di Daerah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	42,04	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Karakteristik Daerah	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan <i>Search and Rescue</i> (SAR)	50	Orang	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	6	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) (Peninjauan Kembali/Revisi) Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Ranperda RTRW) (Peninjauan Kembali/Revisi) Provinsi/Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Karakteristik Daerah	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Mitigasi Lingkungan	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Pendidikan Kesehatan dan Mental Spiritual	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Perekonomian Masyarakat	Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya di Bidang Pertanian/Kelautan dan Perikanan di Daerah Khusus di Daerah Tertinggal	Workshop Diversifikasi Produk Turunan Jagung dalam rangka Ketahanan Pangan di Kawasan Perbatasan di Daerah Tertinggal	60	Orang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	20	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Jagung dan Kacang Hijau	Pengadaan Traktor	1	Unit	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	7.197	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Malaka	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Sarana dan Prasarana	Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Tertinggal	Pembangunan Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	2	Unit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	3	Unit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	29	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan dan Pemberdayaan Terhadap Usaha Tenunan	1	Angkatan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	1	Unit	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Pisang	Pengadaan Peralatan Pengolahan Pisang	1	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian (Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan)	1	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kedokteran Hewan yang Tersedia, Jumlah Ketersediaan Vaksin Rabies, Jumlah Ketersediaan Vaksin SE, Ketersediaan Vaksin Antraks, Ketersediaan Vaksin HOG Colera, Jumlah Ketersediaan Obat Hewan)	1	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Jumlah Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Ekstensifikasi, Intensifikasi, dan Rehabilitasi Komoditi Perkebunan)	1	Paket	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Jumlah Kelompok Tani yang Didampingi dan Mengikuti Sekolah Lapang Tanaman Pangan dan Perkebunan)	1	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (Jumlah Kelompok Tani Penerima Bantuan)	12	Lokasi	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)	12	Lokasi	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	12.423	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	33,29	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	5	Orang	Badan Nasional Penanggulangan Bencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	15	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	20	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	12	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	1	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (3 Unit <i>Rice Milling Unit</i> , 6 Unit <i>Power Thresher</i>)	3	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (<i>Rice Milling Unit</i>)	30	Unit	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Alsintan	Pengadaan Alsintan: <i>Handtracktor</i> , <i>Cultivator</i> , <i>Handsprayer</i> , Mesin pompa air, <i>Combine Harvester</i>	730	Unit	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Bibit Ternak	Bantuan Bibit Ternak Sapi	500	Ekor	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Bibit Ternak	Bantuan Ayam Petelur	10	Kelompok	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	5.879	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	1	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	29,4	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	5	Orang	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	8	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sarana dan Prasarana	Prasarana Air Bersih yang dibangun di Daerah Tertinggal	Pembangunan Prasarana Air Bersih di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Karakteristik Daerah	Masyarakat di Daerah Tertinggal yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	40	Orang	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Karakteristik Daerah	Lahan yang Direhabilitasi dalam mendukung Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana di Daerah Tertinggal	Rehabilitasi Lahan dalam Penguatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana melalui Mitigasi Vegetasi di Daerah Tertinggal	10	Hektar	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	1	Unit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	6	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Karakteristik Daerah	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1	Ton	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	83	Hektar	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	Unit	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian melalui Penyediaan Bibit Shorgum dan Pengawasan Pascapanen	1.000	Hektar	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Unit	Kementerian Pertanian



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	3.887	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Perekonomian Masyarakat	Prasarana Pengembangan Potensi Sumber Daya Pariwisata yang Dibangun di Daerah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar di Daerah Tertinggal	Pembangunan Prasarana Amenitas dan Atraksi Desa Wisata di Daerah Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	43,25	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	12	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) non-Standar (Perpipaan Gravitasi)	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	1	Kit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	10	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan Labkesda Provinsi/Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	1	Unit	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Perekonomian Masyarakat	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Pengembangan Potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan non-Wisata Alam di Kawasan Konservasi	5	Kegiatan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Mesin Potong Padi, Packaging Keripik Pisang, Singkong, Abon Daging, dan ikan)	3	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	123	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	29,53	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	11	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Kemampuan Keuangan Daerah	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Ranperkada RDTR) Kabupaten/Kota Hasil Bimbingan Teknis	1	Materi Teknis	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	2	Kit	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	16	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan Labkesda Provinsi/Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	1	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Jagung)	7	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Jambu Mete)	6	Lokasi	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 145 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Kelapa)	3	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Padi)	8	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Peternakan)	9	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Pinang)	5	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Ketersediaan Pangan Berkualitas	Pengadaan Bantuan Ternak Ayam Buras	2.000	Ekor	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Palawija	Pengadaan Bibit Holtikultura (Sayur, Buah, dan lain-lain)	100	Lokasi	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Jagung	Pengadaan Mesin Giling Jagung	100	Unit	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	11.100	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	1	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	37,12	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	10	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	9	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Kerajinan Bambu	Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam Pembuatan Souvenir Berbahan Bambu	1	Angkatan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Usaha Mikro yang Difasilitasi Perluasan Jangkauan Pemasaran Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro Melalui <i>e-Commerce/Online</i>	10	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	1	Unit	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Jagung Pulut	Penangkaran Benih Lokal Khas Daerah dan Pengembangan Budidaya	1	Paket	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Komoditi Kedelai	Penangkar Benih Daerah dan Pengembangan Budidaya Kedelai Skala Menengah	1	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Pajale dan Horti	Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi	2	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi Pertanian	2	Paket	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.784	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	29,73	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	13	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) non-Standar (Perpipaan Gravitasi)	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana Perumahan	2	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	17	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengadaan Catu Pangan	10	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Pendidikan Kesehatan dan Mental Spiritual	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	2	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	1	Unit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	7	Unit	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	24	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Karakteristik Daerah	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Rehabilitasi Hutan	1	Unit	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Pemipih Jagung dan Perajang Kopi)	3	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman (Traktor Roda Empat Merk Iseki/Kobota/Yanmar)	22	Unit	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mobil Brigade Hama Penyakit	1	Unit	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Ternak Sapi (Jantan dan Betina)	3.000	Ekor	Kementerian Pertanian
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	11.293	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	12	Orang	Kementerian Agama
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	3	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	2	Kit	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	37	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya	1	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	1	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Alpukat)	7	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Pemipil Jagung, Pengereng, dan Penepung Jagung)	5	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	17.597	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan	1	Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Perekonomian Masyarakat	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	15.000	Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Sumber Daya Manusia	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	45	Orang	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

D. Rincian Program, Kegiatan dan *Output* Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sulawesi

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Donggala	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama Buddha non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Insentif	2	Orang	Kementerian Agama
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	500	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sulawesi Tengah	Donggala	Kemampuan Keuangan Daerah	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	1	Persub Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sulawesi Tengah	Donggala	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	1	Kit	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Donggala	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	18	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Donggala	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Donggala	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peningkatan Labkesda Provinsi/Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Donggala	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	128	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Sulawesi Tengah	Donggala	Sarana dan Prasarana	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kota Donggala, Kab. Donggala	240	Sambungan Rumah (SR)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Jagung)	4	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Kelapa Sawit)	3	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyediaan Alat Pascapanen Produk Unggulan di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) dan Perbatasan (Padi)	5	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Bawang	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	Hektar	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Produk Unggulan Sapi Lokal Donggala	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	12.211	Bibit	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2	Unit	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 157 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	7	Unit	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	30	Ton	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pembangunan Penggunaan Prasarana Pertanian	60	Unit	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	30	Unit	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	11.793	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Donggala	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Donggala	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sulawesi Tengah	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	191.785	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sulawesi Tengah	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	95.182	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	500	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sulawesi Tengah	Sigi	Kemampuan Keuangan Daerah	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota	2	Persub Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sulawesi Tengah	Sigi	Kemampuan Keuangan Daerah	Penerapan Inovasi Daerah yang Bersifat Tematik yang Mendukung Iklim Investasi Terutama di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Penerapan <i>Pilot Project</i> Inovasi Daerah yang Bersifat Tematik untuk Mendukung Iklim Investasi di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi Tengah	Sigi	Kemampuan Keuangan Daerah	Program Penguatan Pemerintahan dan Pemberdayaan Pembangunan Desa	Pengembangan Desa Cerdas	15	Desa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rehab/Peningkatan Sarana Air Bersih (SAB)	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Pemenuhan Layanan Unggulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Pemenuhan Layanan Unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	19	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	3.031	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	46	Pendamping	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah	440	Sambungan Rumah (SR)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sulawesi Tengah	Sigi	Kemampuan Keuangan Daerah	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Pascabencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Gedung Kantor Bupati Sigi	1	Unit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pembangunan Rumah Produksi Meubel Rotan dan Kelapa	5	Unit	Kementerian Perindustrian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	Penyediaan <i>Cultivator</i> , <i>Hand Tractor</i> , <i>Hand Sprayer</i> , Mesin Pemotong Rumput, Mesin Pompa Air	90	Unit	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditi Sapi Potong	Pengadaan Ternak Sapi Potong	150	Ekor	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Pembangunan Kandang Koloni Ternak Sapi	10	Unit	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Peternakan	Pembangunan Kandang Koloni Ternak Babi	10	Unit	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan (Perluasan Tanaman Kopi)	100	hektar	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Komoditas Unggulan Durian	Penyediaan dan Pengembangan Bibit Durian Musang King	10.000	pohon	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Komoditas Unggulan Alpukat	Penyediaan dan Pengembangan Bibit Alpukat	20.000	pohon	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Komoditas Unggulan Kelengkeng	Penyediaan dan Pengembangan Bibit Kelengkeng	15.000	pohon	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Komoditas Unggulan Manggis	Penyediaan dan Pengembangan Bibit Manggis	100.000	pohon	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Komoditas Unggulan Bawang Merah dan Bawang Putih	Penyediaan dan Pengembangan Benih Bawang Merah dan Bawang Putih	12.500	Kilogram	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	15.154	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	6.353	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Sigi	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Sigi	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	3	Kit	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	3	Unit	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	3	Paket	Kementerian Kesehatan
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dalam Penanganan Pengungsi	5	Orang	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	500	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kegiatan	Kementerian Dalam Negeri
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Aksesibilitas	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Jembatan Standar	8	Meter	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembukaan Lahan Tebas Tebang Potong (TTP) Lok Torire	1	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Sertifikat Karantina Ekspor, Impor, dan Domestik	12	Bulan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas/ Pelatihan Berbasis Kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas	80	Orang	Kementerian Ketenagakerjaan
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Ekonomi Kreatif	1	Kegiatan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 163 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pelatihan Bidang Pariwisata	1	Kegiatan	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Program Sumber Daya Air	Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten	1	Paket	Kementerian Pertanian
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Karakteristik Daerah	Perlindungan Sosial	Keserasian Sosial	12	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	4.360	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	250	Orang	Kementerian Sosial
Sulawesi Tengah	Tojo Una-Una	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Perekonomian Masyarakat	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	15.000	Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Sumber Daya Manusia	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	45	Orang	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

E. Rincian Program, Kegiatan dan *Output* Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Sumatera

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	4	Kit	Kementerian Kesehatan
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Lampung	Pesisir Barat	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	11	Unit	Kementerian Kesehatan
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	11	Paket	Kementerian Kesehatan
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Kelompok Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dalam rangka Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	1	Kelompok Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	<i>Pilot Project</i> Sarana Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	<i>Pilot Project</i> Sarana Pengembangan Perhutanan Sosial melalui Agroforestri di Daerah Tertinggal	1	Unit	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Lahan yang Dibudidayakan dalam mendukung Pengembangan Perhutanan Sosial di Daerah Tertinggal	Budidaya Lahan Perhutanan Sosial melalui Agroforestri di Daerah Tertinggal	20	Hektar	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Sertifikat Karantina Ekspor, Impor, dan Domestik	12	Bulan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	4.852	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Lampung	Pesisir Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 166 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Lampung	Pesisir Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Lampung	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	129.386	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Lampung	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	60.591	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Barat	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	82.228	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Barat	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	100.955	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	200	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Kemampuan Keuangan Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Pengawasan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	2.249,12	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	10	Kit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	15	Unit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	15	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Peralatan Pengendalian Penyakit	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi	6	Lokasi	Kementerian Agama
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Kemampuan Keuangan Daerah	Pemberian Layanan Pencatatan Sipil di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	1	Kabupaten	Kementerian Dalam Negeri
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Kemampuan Keuangan Daerah	Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa	Pelatihan dan Pendampingan Badan Usaha Milik Desa	50	Paket	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	3	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	23	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	1	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sumber Daya Manusia	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum	1	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1	Kegiatan	Kementerian Perdagangan
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Pisang	Pembangunan Pabrik Pengolahan Pisang	2	Paket	Kementerian Pertanian
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	2.038	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 169 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Perekonomian Masyarakat	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	Konverter Kit Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan Sasaran	15.000	Unit	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Daerah Tertinggal	Kabupaten Daerah Tertinggal	Sumber Daya Manusia	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	Pendidikan Lanjutan Program Afirmasi S-2 Domestik	45	Orang	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Selatan	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	50.228	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Selatan	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	26.636	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	300	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	8	Unit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	8	Paket	Kementerian Kesehatan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 170 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Kebijakan Teknis Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Kegiatan Pendampingan Inventarisasi, Analisis Kebutuhan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana serta Verifikasi Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	1	Rekomendasi Kebijakan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	Supervisi Progres Pembangunan Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga	1	Lembaga Penyalur	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Sertifikat Karantina Ekspor, Impor, dan Domestik	12	Bulan	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Cara Pengemasan Produk Supaya Awet dan Pemasaran Produk	1	Angkatan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	5	Koperasi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Penguatan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	4.656	Hektar	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Bibit Bawang Merah dan Obat-Obatannya	3	paket	Kementerian Pertanian
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Bibit Cabe dan Obat-Obatannya	2	paket	Kementerian Pertanian
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Perekonomian Masyarakat	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Bibit Bebek dan Pakannya	800	Ekor	Kementerian Pertanian
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Mobil Perpustakaan Keliling	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Buku siap layan dan Rak Buku untuk Perpustakaan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	Sertipikat Hak Atas Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Aparatur Sipil Negara (SHAT PTSL ASN)	100.872	Bidang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Utara	Kabupaten Daerah Tertinggal	Kemampuan Keuangan Daerah	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	Peta Bidang Tanah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PBT PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa	118.576,99	Hektar	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Utara	Nias	Perekonomian Masyarakat	Akses Reforma Agraria	Akses Reforma Agraria	100	Kepala Keluarga (KK)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Utara	Nias	Kemampuan Keuangan Daerah	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota	Dokumen Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi/Kabupaten/Kota	1	Persub Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sumatera Utara	Nias	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	4	Kit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	12	Unit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	12	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	5	Kit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Barat	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	13	Unit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	13	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Barat	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penguatan PSC 119	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Alat Surveilans Gizi	1	Kit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	36	Unit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	36	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Rujukan	2	Paket	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Penyediaan Unit Transfusi Darah (UTD)	1	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Utara	Sumber Daya Manusia	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	Peralatan Imunisasi Dasar Lengkap	11	Unit	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias Utara	Sarana dan Prasarana	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	11	Paket	Kementerian Kesehatan
Sumatera Utara	Nias	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	37,06	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sumatera Utara	Nias	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	19	Orang	Kementerian Agama
Sumatera Utara	Nias	Sarana dan Prasarana	Listrik Perdesaan	Listrik Perdesaan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Utara	Nias	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Utara	Nias	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	4	Kelompok	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sumatera Utara	Nias	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	378	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Utara	Nias	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Utara	Nias Barat	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	33,11	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Sumatera Utara	Nias Barat	Karakteristik Daerah	Program Ketahanan Bencana	Kebijakan Teknis Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Kegiatan Pendampingan Inventarisasi, Analisis Kebutuhan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana serta Verifikasi Usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	1	Rekomendasi Kebijakan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sumatera Utara	Nias Barat	Karakteristik Daerah	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan <i>Search and Rescue</i> (SAR)	50	Orang	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Sumatera Utara	Nias Barat	Kemampuan Keuangan Daerah	Badan Usaha Milik Desa yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa	Pelatihan Pengelola Badan Usaha Milik Desa	1	Kegiatan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sumatera Utara	Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1	Kegiatan	Kementerian Perdagangan
Sumatera Utara	Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Batubata melalui Pemanfaatan Teknologi	2	Paket	Kementerian Perindustrian
Sumatera Utara	Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Karet melalui Pemanfaatan Teknologi	3	Paket	Kementerian Perindustrian
Sumatera Utara	Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Kelapa melalui Pemanfaatan Teknologi Pengolahan	3	Paket	Kementerian Perindustrian
Sumatera Utara	Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.200	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias Barat	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Motor Perpustakaan Keliling	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Utara	Nias Barat	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	25,16	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 177 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	36	Orang	Kementerian Agama
Sumatera Utara	Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Utara	Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1	Kegiatan	Kementerian Perdagangan
Sumatera Utara	Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pengembangan Sarana Prasarana Pengrajin (Pembangunan Galeri Seni, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengrajin, Penyediaan Alat Pengrajin)	1	Lokasi	Kementerian Perindustrian
Sumatera Utara	Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadaan Pengolahan Keripik Pisang dan Perlengkapannya	5	Unit	Kementerian Pertanian
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sarana dan Prasarana	Perlindungan Sosial	Rumah Sejahtera Terpadu (RST)	200	Unit	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi)/Pemberdayaan	100	Orang	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	3.204	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias Selatan	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Pojok Baca Digital	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Utara	Nias Selatan	Sarana dan Prasarana	Program Pengembangan Perpustakaan dan Literasi	Bantuan Peningkatan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	1	Perpustakaan	Perpustakaan Nasional
Sumatera Utara	Nias Utara	Sumber Daya Manusia	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Kristen non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Penerima Tunjangan Khusus Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)	26	Orang	Kementerian Agama
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	3	Kegiatan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan	1	Kabupaten	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama	200	Orang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di Daerah Tertinggal	Pelatihan Keterampilan Usaha Produktif Bidang Bordir dan Jahit Bagi Usaha Kecil dan Menengah Wanita	60	Orang	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Koperasi yang Difasilitasi Sistem Digitalisasi	Penerapan Manajemen Koperasi Modern	1	Angkatan	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Sumatera Utara	Nias Utara	Sarana dan Prasarana	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	Pembangunan Pasar Lahewa	1	Unit	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 179 -

Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias Utara	Sarana dan Prasarana	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten	Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Kap. 20 L/det Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lotu	20	L/Detik	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumatera Utara	Nias Utara	Sarana dan Prasarana	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten	Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Bangunan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Lotu	1	Paket	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Fasilitasi dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	1	Kegiatan	Kementerian Perdagangan
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Alat Pengolahan Produk Kelapa	40	Unit	Kementerian Perindustrian
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Alat Pengasapan Ikan kepada Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) beserta Alat Pengemasan	4	Kegiatan	Kementerian Perindustrian
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pembangunan Pompanisasi/Air Perpipaan di Persawahan	1	Lokasi	Kementerian Pertanian
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	3	Lokasi	Kementerian Pertanian
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Peningkatan Produksi Pertanian	Pembangunan Jaringan Irigasi	500	Meter	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 180 -

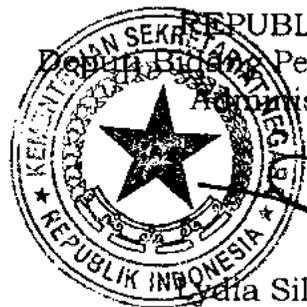
Provinsi	Kabupaten	Kriteria	Nama Program	Nama Kegiatan	Volume	Satuan	Kementerian/Lembaga
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Sembako	1.882	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias Utara	Perekonomian Masyarakat	Perlindungan Sosial	Program Keluarga Harapan (PKH)	1	Kegiatan	Kementerian Sosial
Sumatera Utara	Nias Utara	Sumber Daya Manusia	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Wilayah Khusus	Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	41,58	Persen	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yulia Silvanna Djaman